

**IMPLEMENTASI PROGRAM SAMSAT KELILING DI
KABUPATEN BANYUASIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh

**STYO WIDYANTORO
07011181520172**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM SAMSAT KELILING
DI KABUPATEN BANYUASIN**

SKRIPSI

Oleh :

Styo Widyantoro

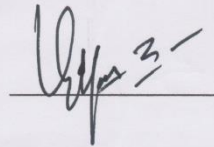
07011181520172

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2019

Pembimbing I

Dr. Nengyanti, M.Hum

19670412 199203 2002



Pembimbing II

Ermanovida, S. Sos., M. Si

19691119 199803 2001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Samsat Keliling di Kabupaten Banyuwasin” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 04 Juli 2019.

Inderalaya, 04 Juli 2019

Ketua

Dr. Nengyanti, M.Hum

NIP.19670412 199203 2002

Anggota

1. Ermanovida., S.Sos., Msi

NIP. 19810827 200912 1002

2. Dr. Andies Lionardo, S.IP., M.Si

NIP. 19790501 200212 1005

3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 19770512 200312 1003

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO

“jangan pernah menunda pekerjaan mu, sekali saja kau menunda maka kau juga akan menunda kesuksesanmu”

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

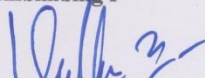
- ✓ **Kedua orang tua ku Joko lelono dan Sumartini**
- ✓ **Kakak dan ponaan ku Mas Angga, MbK Susi dan Keke**
- ✓ **Kakek dan nenek ku Darsan Dan Karni**
- ✓ **Teman-teman seperjuangan Perando, Kosan Lia, dan AP15**
- ✓ **UKM Unsri Mengajar dan Bem Km FISIP UNSRI**
- ✓ **Almamaterku**

ABSTRAK

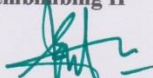
Penelitian Program samsat keliling diatur dalam Nota kesepakatan bersama tentang Pelayanan Samsat Keliling, Samsat Corner, Samsat Payment Point, dan Samsat Desa di Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kep/II/V/2017, Nomor: 34.A/BP/Um/2017, Nomor: P/18/Sp/2017, Nomor: 21.1/DIR/P/2017. Namun di Kabupaten Banyuasin ditemukan fenomena kurangnya sosialisasi, mobil operasional yang belum mencukupi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja implementasi program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode kualitatif yang didukung data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, observasi, wawancara dan kuisioner. Penelitian dilakukan di UPTB pengelolaan pendapatan daerah kelas A Banyuasin. Teori implementasi yang digunakan dari Donald Van Matter dan Carl Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implemetasi program belum sesuai standar dan belum mencapai target program. Hal ini disebabkan dari 6 dimensi menurut Donald Van Matter dan Carl Van Horn hanya dimensi karakteristik yang sudah sesuai. Dari dimensi standard an sasaran kebijakan belum transparansi dan informatif, dari sumberdaya masih terdapat kekurangan sumberdaya manusia pada PT. Jasa Raharja, masih adanya biaya tambahan, masih kekurangan mobil operasional dan kursi untuk menunggu, dari disposisi pelaksana masih terdapat keterlambatan dan ketidakhadiran petugas, dari komunikasi antar organisasi tidak adanya pertemuan rutin, kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, dari lingkungan sosial ekonomi politik, jaringan internet yang tidak stabil dan tingkat pendapatan. Rekomendasi yaitu mengoptimalkan penyebaran informasi tentang samsat keliling melalui media massa maupun secara langsung, melakukan penambahan personil pada PT. Jasa Raharja, meningkatkan anggaran dana operasional samsat keliling, meningkatkan pengawasan dengan melakukan sidak langsung ke lokasi.

Kata Kunci : Implementasi, Nota Kesepakatan Bersama, SAMSAT Keliling

Pembimbing I

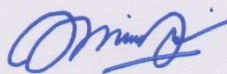

Dr. Nengyanti M. Hum
NIP. 19670412 199203 2002

Pembimbing II


Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2001

Inderalaya, Juli 2019

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si
NIP. 19810827 200912 2002

ABSTRACT

The research on mobile samsat program is arranged in a Memorandum of Understanding on Mobile Samsat Services, Samsat Corner, Samsat Payment Point, and Village Samsat in South Sumatra Province Number: Kep / II / V / 2017, Number: 34.A / BP / Um / 2017, Number : P / 18 / Sp / 2017, Number: 21.1 / DIR / P / 2017. However, in Banyuasin District, there was a phenomenon of lack of socialization and inadequate operational cars. The purpose of this study was to find out the performance of mobile samsat programs in Banyuasin Regency. This type of research is descriptive with qualitative methods supported by quantitative data. Data collection techniques were carried out with documentation techniques, observation, interviews and questionnaires. The study was conducted at the UPTB of class A Banyuasin regional income management. Implementation theory used from Donald Van Matter and Carl Van Horn. The results of the study indicate that the performance of program implementation has not been in accordance with the standard and has not yet reached the program target. This is because of the 6 dimensions according to Donald Van Matter and Carl Van Horn, only the dimensions of characteristics are appropriate. From the standard dimensions and policy objectives, it has not been transparent and informative, from resources there is still a lack of human resources at PT. Jasa Raharja, there are still additional costs, still lacking operational cars and seats to wait, from the implementing position there are still delays and absences of officers, from communication between organizations to the absence of routine meetings, lack of program socialization to the community, from the socio-economic environment, networks that do not stable and income level. The recommendation is to optimize the dissemination of information about mobile samsat through mass media or directly, to add personnel to PT. Jasa Raharja, increasing the budget for mobile samsat operational funds, increasing supervision by conducting direct inspection to the location.

Keywords: Implementation, The Memorandum of Agreement, SAMSAT Around

Advisor I

Dr. Nengyanti M. Hum
NIP. 19670412 199203 2002

Advisor II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2001

Inderalaya, July 2019

Chair of The Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 2002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa kesehatan , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Program Samsat Keliling di Kabupaten Banyuasin”**. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 sarjana Administrasi Publik.

Ucapan terimah kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Joko Lelono dan Sumartini).
2. Bapak Prof. Dr. Anis Sagaf M.Sc selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri. M.S, Selaku Dekan FISIP UNSRI.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrai Publik
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.Si Selaku Pembimbing Akademik.
7. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku pembimbing 1 yang telah sabar memberikan arahan, bimbingan serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
8. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku pembimbing 2 yang telah sabar memberikan arahan, bimbingan serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Administrasi Publik beserta staf akademika FISIP UNSRI.
10. Bapak Mizuar, SE., M.Si selaku kepala UPTB BAPENDA Banyuasin.
11. Robby Tirta Perdana, S.E selaku Kasi Penetapan, Pembukuan & Pelaporan UPTB Kabupaten Banyuasin
12. Bapak Elison Subarto,SH selaku penanggungjawab samsat keliling Banyuasin.
13. Kak Mario dan yuk Irma yang selalu membantu selama proses pengambilan data di UPTB Bapenda Banyuasin.
14. Mas dan mbak saya (Angga dan susi)
15. Teman-teman seperjuangan Iqbal, Ridho, Yoga, Joshua, Agung, Jimi, Atom, Ebit, Himawan, Yasin, Idris, Popong, Herika, Betri, Nidi, Elma, Inti, Rita, Nikma terima kasih atas bantuan dan semangatnya.
16. Keluarga besar Administrasi Publik 2015 yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi dengan judul Implementasi Program Samsat Keliling di Kabupaten Banyuasin ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari penelitian ini.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
B. Teori-teori Implementasi.....	16
C. Teori Impelementasi yang Digunakan	22
D. Kerangka Teori	24
E. Penelitian Terdahulu.....	26
F. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Definisi Konsep.....	35
C. Fokus Penelitian	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Jenis dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Keabsahan Data	42
F. Teknik Analisis Data	42
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Kabupaten Banyuasin.....	43
2. Badan Pendapatan Daerah.....	45
3. Struktur Organisasi.....	47
4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A Banyuasin.....	48
B. Pembahasan Implementasi Program Samsat Keliling di Kabupaten Banyuasin ...	52
1. Standar dan Sasaran Kebijakan	52
2. Sumber Daya	64
3. Karakteristik Agen Pelaksana	74
4. Disposisi/Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana.....	77
5. Komunikasi Antar Organisasi	84
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik.....	90
C. Faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin.....	94
D. Hasil temuan implementasi program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin...	96
 BAB V PENUTUP	
101	
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
 DAFTAR PUSTAKA	
104	
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data rekapitulasi penerimaan PKB Sumatera Selatan selama 3 tahun	3
2. Data rekapitulasi penerimaan PKB Banyuasin	4
3. Jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Banyuasin	5
4. Tunggakan PKB di Kabupaten Banyuasin tahun 2017 – 2018.....	6
5. Data jumlah kendaraan operasional samsat keliling tahun 2017-2018.....	9
6. Penelitian Terdahulu	27
7. Fokus Penelitian	37
8. Data rekapitulasi penerimaan PKB Daerah Banyuasin Selama 4 Tahun.....	61
9. Penerimaan unit samsat keliling UPTB Banyuasin 2017-2018	63
10. Petugas samsat keliling Kabupaten Banyuasin.....	66
11. Fasilitas penunjang program samsat keliling.....	72
12. jadwal operasional samsat keliling UPTB Banyuasin	81
13. Hasil implementasi program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rangkaian implementasi kebijakan.....	14
2. Model implementasi Van Matter dan Van Horn.....	26
3. Kerangka pemikiran	34
4. Peta Banyuasin	44
5. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	46
6. Struktur UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A Banyuasin	48
7. Standar operasional prosedur pelayanan pembayaran pajak.....	54
8. Standar operasional prosedur pelayanan pembayaran PKB melalui samling	55
9. Dokumentasi pendaftaran pajak kendaraan bermotor melalui samling	56
10. Dokumentasi pembayaran pajak melalui samling	57
11. Dokumentasi penyerahan STNK kepada masyarakat oleh petugas samling	59
12. Hasil kuisioner tentang pelayanan samsat keliling	63
13. Kartu Dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	67
14. Hasil kuisioner tentang biaya proses pada proses pembayaran PKB samling...	71
15. Dokumentasi fasilitas samling	72
16. Kertas laporan harian pendapatan samling Kabupaten Banyuasin.....	76
17. Dokumentasi wawancara dengan masyarakat	83
18. Hasil kuisioner kepatuhan petugas terhadap jam perasional samling.....	83
19. Dokumentasi hasil pencarian informasi samling Banyuasin	89
20. Profil kemiskinan Kabupaten Banyuasin.....	91
21. Hasil kuisioner pekerjaan masyarakat yang bayar PKB melalui samling	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kartu Bimbingan ibu Dr. Nengyanti, M.Hum	107
2. Kartu Bimbingan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si	108
3. SK Skripsi	109
4. Nota Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan tentang Pelayanan Samsat Keliling, <i>Samsat Corner</i> , <i>Samsat Payment Point</i> , dan Samsat Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kep/II/V/2017, Nomor: 34.A/BP/Um/2017, Nomor: P/18/Sp/2017, Nomor: 21.1/DIR/P/2017106	
5. Keputusan Bersama Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan Nomor: Kep/05/V/2010/SIL LANTAS, Nomor: 33/DP/UM/2010, Nomor: P/R/384/V/2010 tentang petunjuk layanan unggulan samsat di Provinsi Sumatera Selatan.....	110
6. Perpres No 5 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.....	111
7. Transkrip wawancara	112
8. Hasil kuisisioner	113

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah
BABEL	: Bangka Belitung
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
KASI	: Kepala Seksi
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUPTB	: Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
UPTB	: Unit Pelaksana Teknis Badan
SAMSAT	: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SAMLING	: Samsat Keliling
SKKP	: Surat Keterangan Ketetapan Pajak
SOP	: Standar Operasional Prosedur
STNK	: Surat Tanda Keterangan Bermotor
SUMSEL	: Sumatera Selatan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tentunya sedang mengupayakan pembangunan Nasional, hal tersebut tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang - undang tersebut mengatur bahwa setiap daerah memiliki wewenang, kewajiban serta hak mengurus sendiri daerahnya yang disebut otonomi daerah. Komponen utama pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal sehingga daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Era otonomi ini memacu pemerintah daerah untuk menggali lebih banyak potensi yang ada di daerah terutama pajak. Hal ini dapat terlihat dari upaya-upaya pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah pada daerah tertentu. Kebijakan publik merupakan sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Menurut Thomas R. Dye dalam Zaid Zainal Abidin (2012 : 5) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, selain itu juga berasal daerah itu sendiri baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama pada suatu daerah, dan berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah. Penggunaan pendapatan daerah ini tentunya digunakan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakatnya.

Sumbangan pendapatan daerah terbesar salah satunya melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang ada di daerah. Subjek pajak pada pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Kantor bersama samsat merupakan lembaga penghimpun Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. maka badan pendapatan daerah Sumatera Selatan berkerjasama dengan Kepolisian, Bank Sumsel Babel dan Jasa Raharja membentuk inovasi baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin membayar pajak dengan mengeluarkan kebijakan tentang layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Adapun bentuk kebijakan badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan tentang Pelayanan Samsat Keliling, *Samsat Corner*, *Samsat Payment Point*, dan Samsat Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kep/II/V/2017, Nomor : 34.A/BP/Um/2017, Nomor : P/18/Sp/2017, Nomor : 21.1/DIR/P/2017.

Tujuan kebijakan ini tertuang pada pasal 3 Nota kesepakatan bersama, sebagai berikut:

1. Memberikan akses yang lebih luas dan mudah kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau,
2. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik,
3. Mengevaluasi sampai sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup para pihak,
4. Meningkatkan penyelenggaraan registasi, identifikasi, dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagai fungsi registasi dan identifikasi kendaraan bermotor,
5. Meningkatkan pelayanan publik dibidang pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan,
6. Meningkatkan pelayanan *Payment Point* perbankan bank sumsel babel.

Berdasarkan nota kesepakatan bersama terdapat 4 pelayanan yang terdapat di dalamnya yaitu samsat keliling, samsat corner, samsat desa dan samsat *Payment Point*, dengan adanya pelayanan ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga untuk meningkatkan pendapatan daerah. Maka di bawah ini adalah data Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor) Selama 3 Tahun (2015-2017).

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan Selama 3 Tahun (2015-2017)

NO	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			
	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2015	RP.777,486,320, 361	Rp.788,639,973,747	101,43
2.	2016	RP.1,036,420,637,518	RP.850,081,635,310	82,02
3.	2017	RP.859,985,858,854	RP.877,957,248,995	102,09

Sumber: Subbidang pembukuan, bidang pajak, badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target pendapatan dari PKB yang ditetapkan oleh BAPPEDA dari tahun ketahun mengalami penurunann walaupun disisi realisasi ada yang melebihi target yang telah ditentukan. Layanan inovasi ini baru mulai beroperasi pada tahun 2017 yang merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan namun sangat disayangkan target yang ditetapkan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup drastis apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.1,036,420,637,518 sedangkan pada tahun 2017 menjadi RP.859,985,858,854 dilihat dari sisi pendapatan pun tidak terlalu mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelum adanya samsat keliling, samsat corner, samsat *payment poin*, dan samsat desa/kelurahan pada tahun 2016 dan sesudah layanan ini mulai beroperasi pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp. 27,875,613,685 yang artinya kenaikan ini tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu jauh berbeda dari sebelum adanya samsat keliling pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.2 Data Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Banyuasin Selama 3 Tahun (2015-2017)

NO	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)			
	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2015	RP.35,170,088,482	Rp.34,001,876,635	96,68
2.	2016	RP.46,470,616,428	RP.38,714,108,441	83,31
3.	2017	RP.38,483,211,266	RP.41,600,236,215	108,10

Sumber : Seksi pembukuan, pendapatan dan pelaporan daerah kelas A Banyuasin

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin juga mengalami hal yang sama dengan yang ada di Provinsi Sumatera selatan pada tahun 2015 dan 2016 realisasi pajak yang telah ditetapkan tidak memenuhi dari target dan pada 2017 realisasi pajak kendaraan terpenuhi terget dengan bantuan adanya layanan inovasi program samsat yang salah satunya ialah samsat keliling. Namun seperti Provinsi target mereka pun juga mengalami penurunan yang cukup dratis dari tahun sebelumnya.

Kabupaten banyuasin memiliki wajib pajak kendaraan bermotor yang cukup banyak yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di kabupaten banyuasin. Data yang tercatat pada UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah kelas A Banyuasin jumlah kendaraan yang beredar saat ini berjumlah 237.554 kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berikut ini tabel jumlah kendaraan yang beredar per kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyuasin:

Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Beredar di Kabupaten Banyuasin

NO	KECAMATAN	JUMLAH KENDARAAN
1.	Banyuasin III	54.440
2.	Betung	38.517
3.	Rantau Bayur	6.653
4.	Pulau Rimau	9.132
5.	Talang Kelapa	66.188
6.	Banyuasin I	22.366
7.	Rambutan	8.893
8.	Muara Padang	3.031
9.	Banyuasin II	1.756
10.	Muara Telang	4.837
11.	Makarti Jaya	2.021
12.	Air Saleh	1.750
13.	Tungkal Ilir	6.980
14.	Muara Sugian	1.577
15.	Tanjung Lago	7.469
16.	Suak Tapeh	607
17.	Sembawa	1.004
18.	Air Kumbang	208
19.	Sumber Marga Telang	88
20.	Talang Keramat	37
JUMLAH		237.554

Sumber: kasi pembukuan pendapatan dan pelaporan UPTB Pengelolaan Pendapatan daerah kelas A Banyuasin

Apabila melihat tabel 1.3 maka dapat kita ketahui bahwa jumlah kendaraan terbesar yang beredar di Kabupaten Banyuasin terdapat pada kecamatan talang kelapa dengan jumlah 66.188 kendaraan dan jumlah terkecil pada kecamatan talang keramat dengan jumlah kendaraan yang tercatat sebanyak 37 kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaran demikian maka potensi untuk mendapatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor

cukup besar. Disamping itu tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten banyuasin pada 2 tahun terakhir memperlihatkan jumlah masih lumayan cukup besar. Berikut tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuasin:

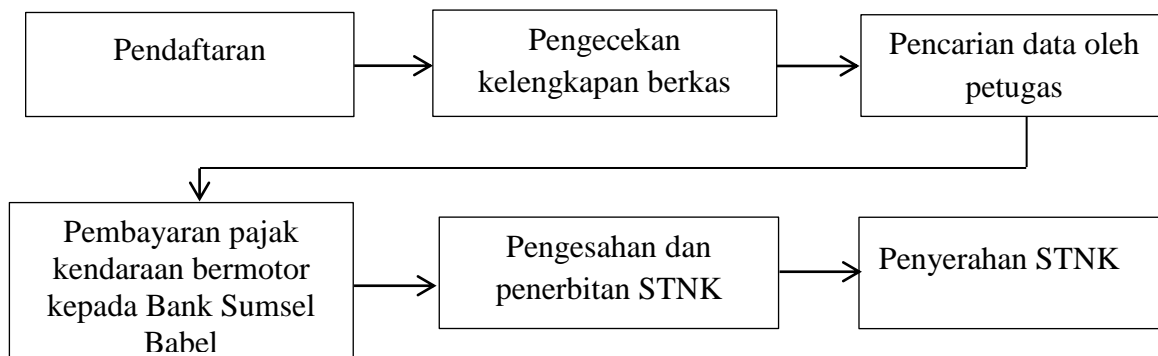
Tabel 1.4 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyuasin tahun 2017 – 2018

No	Tahun	Jumlah Tunggakan
1.	2017	67.329
2.	2018	48.137

Sumber: kasi pembukuan pendapatan dan pelaporan UPTB Pengelolaan Pendapatan daerah kelas A Banyuasin

Melihat dari jumlah kendaraan yang beredar di Kabupaten banyuasin cukup besar dengan jumlah tunggakan kendaraan yang ada maka perlu adanya program atau layanan inovasi yang di keluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah Kabupaten Banyuasin. Salah satu program yang sedang dijalankan oleh pemerintah dari tahun 2017 sampai dengan saat ini ialah program samsat keliling. Menurut nota kesepkatan bersama pasal 2 ayat 5 menyatakan bahwa Samsat Keliling merupakan sarana pembayaran pajak kendaraan bermotor sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan pengesahan STNK satu tahun yang menjangkau wilayah tersulit sekalipun untuk memudahkan wajib pajak, didukung mobil Samsat Keliling dan bus Samsat Keliling.

Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling sebagai berikut:



Pada penelitian terakhir mengenai program samsat keliling didapatkan hasil bahwa samsat keliling dilakukan sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak terkhusus pada pajak kendaraan bermotor yang selama ini pembayarannya masih belum maksimal. Pada dasarnya pelaksanaan layanan pajak keliling sangat efektif dilaksanakan namun kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dikarenakan masih terkendala oleh jumlah mobil layanan pajak keliling. Selain itu akses layanan pajak masih jauh dari tempatnya yang jauh dari kota. Program layanan mobil pajak keliling memang bagus namun perlu disempurnakan pelaksanaannya. Program layanan mobil samsat keliling hanya memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor saja. Selain itu layanan mobil pajak keliling belum menyentuh masyarakat yang jauh dari perkotaan, jadwal layanan mobil pajak keliling yang masih kurang jelas, serta minimnya informasi tentang syarat administrasi apa saja yang harus dipersiapkan ketika masyarakat akan memakai layanan mobil pajak keliling. (Prayoga Bestari. 2016. Mobil Pajak Keliling sebagai Solusi Sosialisasi dan upaya Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak. jurnal Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Bandung Volume 18 No. 2 Juli 2016 : 166 – 176).

Penelitian yang lain menyatakan bahwa dengan adanya samsat keliling mempermudah bagi wajib pajak untuk membayar pajak, selain itu terdapat faktor-faktor penghambat penerapan layanan inovasi samsat keliling yakni kesadaran Wajib Pajak, sarana dan prasarana serta keterbatasan layanan yang diberikan dan yang terakhir penerimaan pajak dari samsat keliling di Kabupaten Tulungagung belum stabil (Leli Ardiani, Kadarisman Hidayat, Sri Sulasmiyati. 2016 .Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama samsat Kabupaten Tulungagung. Jurnal perpajakan.student journal.ub.ac.id Vol. 9 No. 1 2016).

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa alasan penulis melakukan penelitian terhadap implementasi program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin, sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang samsat keliling kepada masyarakat Banyuasin;

Hakikat dari desentralisasi di era otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah mempercepat proses informasi, komunikasi, dan sosialisasi dari pihak pemerintah. Berbagai informasi dan sosialisasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat terkadang berjalan lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. Masyarakat seringkali tidak mengetahui program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Unit pelaksana teknis badan pendapatan daerah Banyuasin khususnya pelaksana dalam bidang pelayanan pajak harus memberikan akses kemudahan kepada masyarakat yang letaknya jauh dari perkotaan, agar masyarakat merasa mudah jika membutuhkan pelayanan khususnya layanan pembayaran pajak. Samsat keliling merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bekerjasama dengan beberapa instansi guna meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya. Adanya samsat keliling maka masyarakat yang bersangkutan tidak perlu jauh-jauh mendatangi kantor samsat saat mengurus pembayaran pajak kendaraan yang dimilikinya, masyarakat hanya perlu mengunjungi mobil/bus samsat keliling yang sedang beroperasi di wilayah tersebut. Melihat besarnya manfaat dari samsat keliling ini maka perlu adanya penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan ini sehingga tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dapat tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Penyebaran informasi dan sosialisasi terkait samsat keliling di Kabupaten Banyuasin masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan samsat keliling ditengah-tengah mereka, sehingga perlu adanya penyebaran informasi melalui

berbagai media seperti media cetak atau online baik melalui berita, akun media sosial maupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi diharapkan, masyarakat sebagai wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik sesuai dengan peran masing-masing.

2. Minimnya mobil samsat keliling yang dioperasikan di Kabupaten Banyuasin;

Tabel. 1.5 Data Jumlah Kendaraan Operasional Samsat Keliling Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018

NO	UPTB	JUMLAH	KETERANGAN
1	PALEMBANG I	4	ADA
2	PALEMBANG II	1	ADA
3	MUBA I	1	ADA
4	MUBA II	0	TIDAK ADA
5	BANYUASIN	1	ADA
6	OKI I	1	ADA
7	OKI II	1	ADA
8	OGAN ILIR	1	ADA
9	OKU	1	ADA
10	OKU SELATAN	0	TIDAK ADA
11	OKUT I	1	AKTIF
12	OKUT II	0	TIDAK ADA
13	PRABUMULIH	1	ADA
14	MUARA ENIM	2	ADA
15	LAHAT	1	ADA
16	PAGAR ALAM	1	ADA
17	MUSI RAWAS	1	ADA
18	LUBUK LINGGAU	1	ADA
19	EMPAT LAWANG	1	ADA
20	MURATARA	0	TIDAK ADA
21	PALI	1	ADA

Sumber : UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Kelas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 1.2 dijelaskan bahwa Bus operasional samsat keliling yang ada di Sumatera Selatan saat ini terdiri dari 21 mobil operasional samsat keliling yang disebar ke 17 kab/kota, dengan jumlah 21 mobil maka menimbulkan ketidakmerataan jumlah bus disetiap daerah. Satu daerah/UPTB mendapat satu mobil bus operasional ada yang lebih

bahkan ada yang tidak mendapatkan bus operasional samsat keliling. Jumlah kendaraan disetiap UPTB berbeda-beda, hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dengan memanfaatkan layanan samsat keliling. Akibat kurangnya kendaraan operasional samsat keliling ini menyebabkan daerah yang seharusnya dapat mendapatkan lebih dari satu mobil operasional hanya mendapatkan satu mobil saja sedangkan beberapa daerah/UPTB memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, seperti Banyuasin merupakan wilayah terluas ke tiga di Sumatera Selatan dengan luas wilayah 11,832,99 KM2 jumlah populasi sebesar 850,110 jiwa. Selain itu jumlah kendaraan yang beredar cukup banyak dengan jumlah 237.554 yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin oleh sebab itu memerlukan lebih banyak lagi samsat keliling agar dapat memaksimalkan program tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap implementasi samsat keliling di Kabupaten Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja implementasi program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja implementasi program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program samsat keliling di Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut .:

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan dijadikan sebagai penunjang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik dan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Selatan terkhusus Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin dalam hal samsat keliling.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Al Wasi'u, Jannatin. *Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (EYD)*: Sendang Ilmu Solo.
- Barnawi, Arifin. M. 2015. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.
- Creswell, W. John. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Gava Media: Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Pt. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistiyastuti, Ratih Diyah . 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Gava Media: Yogyakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik konsep, isu, dan aplikatif*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Thoha, Mifta. 2008. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Kencana Premadamedia grup: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. PT. Buku Seru: Yogyakarta.

PERATURAN

Nota Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan tentang Pelayanan Samsat Keliling, *Samsat Corner*, *Samsat Payment Point*, dan Samsat Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kep/II/V/2017, Nomor : 34.A/BP/Um/2017, Nomor : P/18/Sp/2017, Nomor : 21.1/DIR/P/2017.

Perpres No 5 Tahun 2015 Tentang Layanan Satuan Manunggal Satu Atap

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak daerah.

Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

JURNAL

Ardiani Leli, Kadarisman Hidayat, Sri Sulasmiyati. 2016. *Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor*. jurnal *Perpajakan.stuDentjournal.ub.ac.id*. vol. 9 no. 1 2016.

Bestari, prayoga. 2016. *Mobil Pajak Keliling Sebagai Solusi Sosialisasi Dan Upaya Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak*. Sosiohumaniora, jurnal Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Bandung volume 18 no. 2 juli 2016 : 166 – 176.

Prayoga, Agryan Wahyu. 2014. *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sugiyanto. 2014. *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjung Pinang (Studi Pada DPPKAD Kota Tanjungpinang)*. http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/E-journal-Sugiyanto-100565201-382.pKdf.

Wiwiet Hertiarani. *Implementasi kebijakan e-samsat di Jawa Barat*. Inspektorat Pengawasan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Halaman 419 – 440.

SUMBER INTERNET

Bapenda.sumselprov.go.id diakses pada 5 oktober 2018 pukul 09.15 wib.

<http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html> diakses pada 5 september 2018 pukul 08.00 14 wib

www.bps.go.id

SKRIPSI

Sulasih, Uliyah 2018. *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di SMA Negeri 1 Sungai Lilin Tahun 2016*. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SUMBER LAIN

Hasil kuisisioner kepada masyarakat tentang pelayanan samsat keliling di Kabupaten Banyuasin. 2019